

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ali, Z. (2010). *Metode Penelitian Hukum*,. jakarta: sinar grafika.
- Andi, J. (2015). *Panduan lengkap hukum praktis: kepemilikan tanah*,. surabaya: laksana Justitia.
- Budi harsono. (1999) *Hukum agrarian Indonesia, Sejarah Pembentukan Pokok-Pokok Agraria*, Jakarta: Djambatan,
- Ishaq. (2017). *Metode Penelitian Hukum*,. bandung: Afabeta, .
- Muhaimin. (2020). *Metode Penelitian Hukum*,. Unram Pres.
- Muhammad Syaifuddin, (2002). *Hukum Kontrak, Memahami Kontrak dalam Perspektif Filsafat, teori, Dogmatik, dan Praktik Hukum (Seri Pengayaan Hukum Perikatan)*, Bandung:Mandar Maju.
- Miru Ahmadi, Pati Sakka,,(2019). *Hukum Perikatan (penjelasan makna pasal 1233 sampai 1456 BW)*, Depok:PT Rajagrafindo Persada.
- Meliala djaja, (2016) *Perkembangan hukum Perdata Tentang Benda Dan Hukum Perikatan*, Bandung,Penerbit Nuansa Aulia.
- Soimin, S. (2004). *Status Hak Dan Pembebasan Tanah*,. jakarta: sinar grafika.
- Soerjono Soekanto, S. M. (1995). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*,. jakarta: PT. Raja Grafindo .
- Suryabrata, S. (2006). *metodologi penelitian* . jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

JURNAL

Amin Muhammad, Herwastoet, Isrok Muhammad, Analisis Praktik Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Yang Dilakukan Di Hadapan Kepala Desa, E-ISSN: 2776-9674 ISSN : 2776-9259 ILREJ, Vol. 1, No. 2, Juli 2021.

Brutu Mahmud Amir, 2019, Perlindungan Hukum Jual Beli Hak Atas Tanah Secara Lisan (Studi Putusan Nomor: 114/PDT/2015/PT.MDN),, Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sumatra Utara Medan.

Dewi Iga Elit, Prinsip Kehati-Hatian Dalam Melaksanakan Tugas Dan Wewenang Notaris Dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Skripsi, Universitas Jember Fakultas Hukum 2019.

Gaol Lumbat Selamat , Keabsahan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah Sebagai Dasar Pembuatan Akta Jual Beli Tanah Dalam Rangka Peralihan Hak Atas Tanah Dan Penyalahgunaan Keadaan (Misbruik Van Omstandigheden), (Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara–Fakultas Hukum Universitas Dirgantara Marsekal Suryadarma Volume 11 No. 1, September 2020)

Hamidah Upik, Implikasi Diskresi Kepala Kantor Pertanahan Dalam Pendaftaran Tanah (Volume 3 Nomor 2, Juli-Desember 2019: hlm. 93-100. Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia. E-ISSN: 2598-3105 P-ISSN: 2723-2581).

Hayati Nur, Peralihan Hak Dalam Jual Beli Hak Atas Tanah (Suatu Tinjauan terhadap Perjanjian Jual Beli dalam Konsep Hukum Barat dan Hukum Adat dalam Kerangka Hukum Tanah Nasional), Lex Jurnalica Volume 13 Nomor 3, Desember 2016.

Larasati Ayu, Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Pertanahan Indonesia, Volume 1 Nomor 1 Februari 2020.

Larasati Ayu, Raffles, Peralihan Hak Atas Tanah Dengan Perjanjian Jual Beli Menurut Hukum Pertanahan Indonesia (Zaaken Journal of Civil and Bussiness Law Volume 1 Nomor 1 Februari 2020)

M. Mutharom, Asas-Asas Hukum Perjanjian: Suatu Landasan Dalam Pembuatan Kontrak, SUHUF, Vol. 26, No. 1, Mei 2014: 48-56.

Rosandi Paramita Henni Baiq, Akibat Hukum Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Belum Didaftarkan, Jurnal IUS Vol IV Nomor 3 Desember 2016.

Rosandi Paramita Henni Baiq, Akibat Hukum Jual Beli Hak Atas Tanah Yang Belum Didaftarkan, Jurnal IUS Vol IV Nomor 3 Desember 2016.

Sinaga Anita Niru, Peranan Asas-Asas Hukum Perjanjian Dalam Mewujudkan Tujuan Perjanjian, Binamulia Hukum Vol. 7 No. 2, Desember 2018.

Rondonuwu Giovanni, Kepastian Hukum Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Melalui PP No 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (Lex Privatum Vol. V/No. 4/Jun/2017).

Saranaung Mayore Fredrik, Peralihan Hak Atas Tanah Melalui Jual Beli Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, Lex Crimen Vol. VI/No. 1/Jan-Feb/2017.

Suwardi, Atmoko Dwi Arief, Esensi Peralihan Hak Kepemilikan Melalui jual Beli Hak Atas Tanah Sesuai UndangUndang Pokok Agraria No 5 Tahun 1960 (E-ISSN :2580-9113 P-ISSN : 2581-2033 Lex Journal: Kajian Hukum Dan Keadilan).

Putri Kurnia Dewi, Dkk, Perbedaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas Dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tidak Lunas, Vol. 4 No. 4 Desember 2017.

Wardhani Crishtina Lidya, (2017) , Tanggung Jawab NOTARIS/PPAT Terhadap Akta Yang Dibatalkan Oleh Pengadilan, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

INTERNET

Dwiwanto Dodiék, Memahami Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) dan Kekuatan Hukumnya, Kalau Mau Jual Beli Properti Wajib Tahu, <https://artikel.rumah123.com>. 29 November 2021, Diakses pada Tanggal 1 Juni 2022, Pukul 18.40 WIB.

Edited By Cermati.com, Memahami Arti PPJB,PJB, Dan AJB Agar terhindar Dari Penipuan, <https://www.cermati.com/>,19 April 2016, Diakses Pada tanggal 1 Juni 2022, Pukul 10.00 WIB.

Ham Budiman, Jangan Anggap Sepele, Ini Risiko Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Disertai Tips Aman Sesuai Prosedur, <https://www.99.co/blog>. Diakses pada tgl 23 agustus 2022, pukul 08.00 WIB.

<https://kbbi.web.id/jual%20beli>, Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2022.

Permatasari Erizka, Asas-Asas Hukum Kontrak Yang Harus Kamu Tahu, <https://www.hukumonline.com>, Kamis, 28 Oktober 2021, Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2022 Pukul 18.00 WIB.

Redaksi OCBC NISP, Notaris Adalah: Pengertian,Tugas,Syarat Dan Kewenangan,

<https://www.ocbcnisp.com/> , 1 November 2021, Diakses Pada Tanggal 3 Juni 2022, Pukul 6.30 WIB.

Sumardana Putra Agus I Putu, Dasar Hukum Jual Beli Tanah, 8 Maret 2020,

<https://www.jasahukumbali.com>, Diakses Pada Tanggal 1 Juni 2022, Pukul 15.53 WIB.

Tantri Kartika Winny, Dkk, Kewenangan Pejabat Sementara Notaris Membuat

Akta Pertanahan Tidak Dalam kewenangannya Sebagai PPAT, Dari

<http://www.notary.ui.ac.id>, Diakses Pada Tanggal 2 Juni 2022.

Wilson Pompana, Kedudukan PPJB dalam Jual Beli Tanah, 7 Februari

2022,<https://www.hukumonline.com/klinik>, Diakses Tanggal 31 Mei 2022 Pukul 19.25 WIB.

UNDANG-UNDANG

Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Peraturan Pemerintah pasal 37 Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah.

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 153 PK/PDT/2005

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 952/K/SIP/1975

Putusan Mahkamah Agung Nomor: 480 K/Sip/1971

Peraturan Pemerintah pasal 1 Nomor 24 Tahun 2016 Tentang Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Peraturan Pemerintah Pasal 1 Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 1960 Pokok-Pokok Agraria

